ISSN 2337-7771
e-ISSN 2337-7992

JURNAL HUTAN TROPIS

Berkala Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan

ANALISIS VEGETASI DAN VISUALISASI STRUKTUR VEGETASI HUTAN KOTA BARUGA

PENGARUH NAUNGAN TERHADAP PERTAMBAHAN TINGGI BIBIT BUAH JENTIK (*Baccaurea polyneura*)

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENYARADAN KAYU *Acacia crassicarpa*

ANALISIS FINANSIAL USAHA HUTAN RAKYAT POLA MONOKULTUR

ANALISIS GENDER DALAM PENGELOLAAN AGROFORESTRI

PENGAYAAN VEGETASI PENUTUPAN LAHAN UNTUK PENGENDALIAN TINGKAT KEKRITISAN DAS SATUI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DI DESA GUNTUNG UJUNG

IDENTIFIKASI KESEHATAN BIBIT SENGON (*Paraserianthes falcataria L*)

POTENSI TEGAKAN KAYU BAWANG (*Dysoxylum mollissimum Blume*)

PERSEPSI MASYARAKAT SUKU DAYAK HANTAKAN BARABAI

JENIS, PERILAKU, DAN HABITAT TURPEPEL (*Coura amboinensis amboinensis*)

PENILAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT

DITERBITKAN ATAS KERJASAMA
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
PERSATUAN SARJANA KEHUTANAN INDONESIA (PERSAKI) PUSAT

JHT	Volume 3	Nomor 2	Halaman 99-198	Banjarbaru Juli 2015	ISSN 2337-7771 E-ISSN 2337-7992

Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2 Juli 2015 ISSN 2337-7771
E-ISSN 2337-7992

JURNAL HUTAN TROPIS

Berkala Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kehutanan

DAFTAR ISI

ANALISIS VEGETASI DAN VISUALISASI STRUKTUR VEGETASI HUTAN KOTA BARUGA, KOTA KENDARI
Zulkarnain, S.Kasim, & H. Hamid **99-109**

PENGARUH NAUNGAN TERHADAP PERTAMBAHAN TINGGI BIBIT BUAH JENTIK (*Baccaurea polyneura*)
Basir Achmad, Muchtar Effendi, & Muhammad Fajri Haika **110-115**

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENYARADAN KAYU *Acacia crassicarpa* MELALUI PENERAPAN TEKNIK RAMAH LINGKUNGAN
Sona Suhartana & Yuniawati **116-123**

ANALISIS FINANSIAL USAHA HUTAN RAKYAT POLA MONOKULTUR, CAMPURAN DAN AGROFORESTRI DI KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN
Sutisna **124-132**

ANALISIS GENDER DALAM PENGELOLAAN AGROFORESTRI DUKUH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI DESA KERTAK EMPAT KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR
Hafizianor, Rina Muhayah N.P, & Siti Zakiah **133-144**

PENGAYAAN VEGETASI PENUTUPAN LAHAN UNTUK PENGENDALIAN TINGKAT KEKRITISAN DAS SATUI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Syarifuddin Kadir & Badaruddin **145-152**

UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DI DESA GUNTUNG UJUNG KECAMATAN GAMBUT, KALIMANTAN SELATAN
Normela Rachmawati **153-157**

IDENTIFIKASI KESEHATAN BIBIT SENGON (*Paraserianthes falcataria L*) DI PERSEMAIAN
Dina Naemah, & Susilawati **158-165**

POTENSI TEGAKAN KAYU BAWANG (*Dysoxylum mollissimum Blume*) PADA SISTEM AGROFORESTRI SEDERHANA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
Efratenta Katherina Depari, Wiryono, & A. Susatya **166-172**

PERSEPSI MASYARAKAT SUKU DAYAK HANTAKAN BARABAI TERHADAP KEGIATAN IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) ANEKA OLAHAN BUAH DURIAN
Arfa Agustina Rezekiah, Rosidah, & Siti Hamidah **173-178**

JENIS, PERILAKU, DAN HABITAT TURPEPEL (*Coura amboinensis amboinensis*) DI SEKITAR SUNGAI WAIRUAPA DESA WAIMITAL, KECAMATAN KAIRATU, SERAM BAGIAN BARAT
Dwi Apriani, E. Badaruddin, & L. Latupapua **179-191**

PENILAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Andi Chairil Ichsan & Indra Gumay Febryano **192-198**

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada para penelaah yang telah berkenan menjadi Mitra Bestari pada Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2 Edisi Juli 2015 yaitu:

Dr. Satyawan Pudyatmoko,S.Hut,M,Sc
(Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)

Prof.Dr.Ir. Wahyu Andayani,M.Sc
(Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)

Prof.Dr.Hj.Nina Mindawati,M.S
(Puslitbang Produktivitas Hutan, Kementerian Kehutanan RI)

Prof. Dr. Ir. Syukur Umar, DESS
(Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako)

Prof. Dr. Ir. Baharuddin Mappangaja, M.Sc.
(Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin)

Prof.Dr.Ir.H.M.Ruslan,M.S
(Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat)

Dr.Ir. Satria Astana, M.Sc
(Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Kehutanan RI)

Dr. Ir. Purwadi, M.S
(Institut Pertanian STIPER Yogyakarta)

Dr.Ir. Cahyono Agus Dwikoranto, M.Agr.
(Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada)

Prof. Dr. Ir, Djamal Sanusi
(Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin)

Dr. Sc. Agr. Yusran, S.P., M.P
(Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako)

KATA PENGANTAR

Salam Rimbawan,

Jurnal Hutan Tropis Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli 2015 menyajikan 12 buah artikel ilmiah hasil penelitian kehutanan.

Analisis Vegetasi dan Visualisasi Struktur Vegetasi Hutan Kota Baruga, Kota Kendari diteliti Zulkarnain, S.Kasim, & H. Hamid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi vegetasi disusun oleh 76 spesies yang terkelompok dalam 29 famili dengan jumlah total 8.296 individu untuk semua spesies. *Alstonia macrophylla, Gironniera subaequalis* dan *Nephelium lappaceum* adalah spesies yang mendominasi komunitas vegetasi.

Pengaruh Naungan terhadap pertambahan tinggi bibit buah Jentik (*Baccaurea polyneura*) ditulis Basir Achmad, Muchtar Effendi, & Muhammad Fajri Haika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat naungan 85% atau intensitas cahaya 15% memberikan pertumbuhan tinggi paling optimum (1,15 cm) bagi bibit buah jentik.

Sona Suhartana & Yuniawati meneliti Peningkatan Produktivitas Penyaradan Kayu *Acacia Crassicarpa* melalui Penerapan Teknik Ramah Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RIL dalam penyaradan kayu *A. crassicarpa* dapat meningkatkan produktivitas 11,59% dan menurunkan biaya sarad sebesar 10,59%.

Analisis Finansial Usaha Hutan Rakyat Pola Monokultur, Campuran dan Agroforestri Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan diteliti Sutisna. Secara finansial usaha hutan rakyat di lokasi penelitian dapat memberikan dampak positif dan layak untuk dikembangkan dengan Nilai NPV pola monokultur Rp. 7,674,98, campuran Rp. 20,668,993 dan agroforestry Rp. 46,011,857 dan BCR pola monokultur 2,38,campuran 1,54dan agroforestry 1,76.

Hafizianor, Rina Muhayah N.P, & Siti Zakiah meneliti Analisis Gender dalam Pengelolaan Agroforestri *Dukuh* dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. *Dukuh* memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 14% dan dari luar dukuh sebesar 86%.

Pengayaan Vegetasi Penutupan Lahan untuk Pengendalian Tingkat Kekritisan DAS Satui Provinsi Kalimantan Selatan ditulis oleh Syarifuddin Kadir & Badaruddin. Arahan penuruan tingkat kekritisan lahan; a) pengayaan tutupan vegetasi hutan menjadi seluas 66.975,57 ha (44 %), sedangkan lahan terbuka, semak belukar dan pertambangan berkurang seluas 17.782,99 ha (12 %); b) berdasarkan adanya pengayaan vegetasi menurunkan tingkat kekritisan lahan menjadi lahan kritis 1.536,82 ha (1, 01%).

Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan di Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan ditulis oleh Normela Rachmawati. Upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan yang dilakukan masyarakat di desa Guntung Ujung dengan nilai tertinggi adalah Pembersihan Bahan Bakar Bawah Tegakan yaitu sebesar 65,75 % (48 responden) dan Pembuatan Sekat Bakar 34,25 % (25 responden)

Dina Naemah, & Susilawati melakukan Identifikasi Kesehatan Bibit Sengon (*Paraserianthes falcataria* L) di persemaian. Hasil yang diperoleh bahwa penyebab kerusakan yang paling dominan adalah penyakit pada faktor abiotik sebesar 71,55%, tipe kerusakan yang dominan yaitu perubahan warna daun yang ditandai dengan daun menjadi berwarna kuning sebesar 73,77%, intensitas serangan keseluruhan sebesar 85,33%.

Potensi Tegakan Kayu Bawang (*Dysoxylum mollissimum* Blume) Pada Sistem Agroforestri

Sederhana Di Kabupaten Bengkulu Utara ditulis oleh Efratenta Katherina Depari, Wiryono, & A. Susatya. Kayu bawang yang ditanam dengan kopi cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibanding kayu bawang yang ditanam dengan kopi dan karet. Kayu bawang yang ditanam dengan kopi memiliki volume sebesar 43,88 m^3/ha (umur 3 tahun), 82,99 m^3/ha (umur 7 tahun), 116,13 m^3/ha (umur 9 tahun), sedangkan yang ditanam dengan kopi dan karet memiliki volume sebesar 15,15 m^3/ha (umur 3 tahun), 82,8 m^3/ha (umur 7 tahun), 79,44 m^3/ha (umur 9 tahun).

Persepsi Masyarakat Suku Dayak Hantakan Barabai Terhadap Kegiatan Ipteks Bagi Masyarakat (I_bM) aneka olahan buah durian diteliti oleh Arfa Agustina Rezekiah, Rosidah, & Siti Hamidah. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dayak adalah tingkat pendidikan, pengetahuan yang turun temurun serta mata pencaharian masyarakat dayak sebagai petani.

Dwi Apriani, E. Badaruddin, & L. Latupapua meneliti Jenis, Perilaku, dan Habitat Turpepel *(Coura amboinensis amboinensis)* Di Sekitar Sungai Wairuapa Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat. Turpepel yang diteliti tersusun atas karapas (*carapace*) yaitu tempurung atau batok yang keras dengan warna karapas hitam kecokelatan, hitam keabu-abuan, serta hitam pekat, dan plastron yaitu susunan lempengan kulit keras pada bagian perut dengan warna plastron putih dan memiliki corak acak berwarna hitam. Turpepel menyukai jenis tempat yang lembab gelap dan tempat yang kering gelap, karena jenis tempat tersebut adalah tipe habitat semi akuatik yaitu tipe habitat campuran antara daratan (tanah) dan air, yang merupakan habitat dari Turpepel.

Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat diteliti oleh Andi Chairil Ichsan & Indra Gumay Febryano. Hasil penilaian menunjukkan rata-rata keseluruhan dari kriteria yang dinilai berada pada rentang cukup, yang berarti KPH Rinjani sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak.

Semoga hasil penelitian tersebut dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca untuk dikembangkan di kemudian hari. Selamat Membaca.

Banjarbaru, Juli 2015

Redaksi,

Jurnal Hutan Tropis Volume 3 No. 2 *Juli 2015* *ISSN 2337-7771*
E-ISSN 2337-7992

PENILAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Performance Assessment for Development of Protection Forest Management Unit of Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat Province

Andi Chairil Ichsan & Indra Gumay Febryano
Program Studi Kehutanan Universitas Mataram
Jl Majapahit No 62, Mataram, NTB
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung, Lampung

ABSTRACT. *Protection Forest Management Unit of Rinjani Barat (KPHL Rinjani Barat) has position and important role in the successful of forest resources management at the site level. However, the success of its management is inseparable from the various dynamics and issues, such as the still high conflict between communities and the government, not the completion of the reconstruction process boundaries, and the absence of security guarantees on investment of various parties in this region. This study aims to assess the performance of KPHL Rinjani Barat in the implementation of forest management at the site level by using criteria and indicators of Forest Watch Indonesia version 1.0. The results showed that KPHL Rinjani Barat is quite ready to realize its function as a unit of forest management. Several criteria have to be a concern, namely the stability of the region, management planning, and investment mechanism, so it must be strengthened to ensure its operationalization at the site level.*

Keywords*: Protection Forest, Protection Forest Management Unit*

ABSTRAK. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat mempunyai posisi dan peran penting dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat tapak. Namun, keberhasilan pengelolaannya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan persoalan, seperti masih tingginya konflik antara masyarakat dan pemerintah, belum selesainya proses rekonstruksi tata batas, dan belum adanya jaminan keamanan terhadap investasi berbagai pihak di wilayah KPHL tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja KPHL Rinjani Barat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan menggunakan kriteria dan indikator dari *Forest Watch Indonesia* versi 1.0. Hasil penilaian menunjukkan rata-rata keseluruhan dari kriteria yang dinilai berada pada rentang cukup, yang berarti KPH Rinjani sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Beberapa kriteria perlu menjadi perhatian, yaitu kemantapan kawasan, rencana kelola, dan mekanisme investasi, sehingga harus diperkuat untuk menjamin operasionalisasi KPHL di tingkat tapak.

Kata Kunci: Hutan Lindung, Kinerja, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Penulis untuk korespondensi, surel: andi.forester@gmail.com

PENDAHULUAN

Terjadinya kerusakan hutan dan deforestasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang sistem pengurusan hutan di Indonesia. Sampai saat ini, kita belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari paradigma kolonialisme yang memandang hutan sebagai sumber ekonomi dengan jenis komoditas utama kayu. Cara pandang ini diimplementasikan melalui struktur peraturan dan praktek-praktek pemanfaatan hutan secara langsung (*timber extraction*) maupun melalui budidaya (*timber management*), dengan memberikan hak-hak istimewa kepada para pemilik modal besar (korporasi) dan secara terstruktur memarjinalkan posisi dan hak-hak utama masyarakat adat/lokal. Kerusakan hutan yang terus terjadi, tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tapi juga akan menurunkan daya dukung ekologis bagi kehidupan umat manusia. Di Indonesia, keadaan ini berimplikasi pada ketidakjelasan nasib sekitar 48,8 juta penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong dalam kategori masyarakat miskin (Wiyono *et al*., 2006).

Seiring dengan terjadinya gerakan sosial pada tahun 1998 yang menuntut reformasi politik, dalam sektor kehutanan juga telah terjadi perubahan undang-undang yang menjadi landasan hukum pengurusan hutan di Indonesia, dimana UU No. 5/1967 selanjutnya berganti menjadi UU No. 41/1999. Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah memandatkan kepada pemerintah untuk membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada seluruh kawasan hutan. Pada masa sebelum hingga diterbitkannya UU No. 41/1999, konsep KPH hanya ada di dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa seluas 2.448.043,4 ha atau sekitar 1,6% dari luas total kawasan hutan yang ditunjuk sebagai hutan negara 127 juta ha. Pengelolaan hutan inipun sesungguhnya hanya melanjutkan pengelolaan KPH yang sudah dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dengan corak kebijakan kehutanan konvensional. Sedangkan kawasan hutan negara lainnya (124,5 juta ha atau sekitar 98,4%), dimana sebagian besar berada di luar Pulau Jawa, belum dikelola dalam bentuk KPH-KPH. Kecuali pada kawasan hutan konservasi (22 juta ha atau sekitar 17%) yang telah dikelola sejumlah Balai Taman Nasional (BTN) dan Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) (Suwarno, 2014).

Konsep KPH yang baru, diharapkan menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan. Secara konseptual kebijakan pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berfikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran birokrat kehutanan dari *forest administrator* menjadi *forest manager*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo & Suwarno 2014). Selain itu keberadaan KPH juga diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan "transisi" menuju kepada desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH, *Forest Watch* Indonesia (FWI) telah menyusun panduan yang digunakan untuk menggali informasi dan menilai kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Panduan ini memaparkan sejumlah kriteria dan indikator (K & I) penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Forest Watch Indonesia, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kinerja KPH dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, dengan menganalisis kesenjangan terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan. Dengan proses penilaian seperti ini, diharapkan ada masukan dari *stakeholder* untuk mendorong pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih profesional, adil, dan lestari.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2015 di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko, 2003). Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan K & I FWI versi 1.0 (Forest Watch Indonesia, 2014). Hasilnya disajikan dalam bentuk indeks, dengan menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah (Tabel 1).

Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Table 1. Categorization for Index of Performance Assessment of FMU Development

Nilai Indeks	Kategori	Uraian
2,34 – 3,00	Tinggi	Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,67 - 2,33	Sedang	Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
1,00 -1,66	Rendah	Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.

Sumber: Forest Watch Indonesia (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata keseluruhan dari delapan kriteria yang dinilai berada pada rentang baik yang berarti KPH Rinjani sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak (Gambar 1).

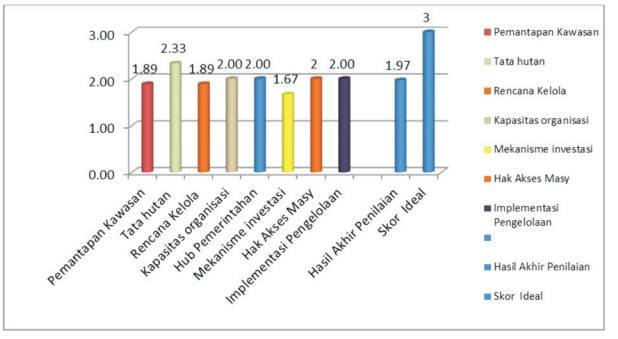

Gambar 1. Penilaian kinerja pembangunan KPHL Rinjani Barat

Figure 1. Performance Assessment for Development of Protection Forest Management Unit of Rinjani Barat

Penjelasan untuk masing-masing kriteria penilaian di atas adalah sebagai berikut:

Kemantapan Kawasan

Proses tata batas di KPHL Rinjani Barat mengacu pada hasil penataan batas yang dilakukan pada tahun 1954, termasuk dalam tiga kelompok hutan meliputi RKT1, RKT2, RKT6. Pada tahun 1993 hingga tahun 2012 sebagian wilayah tersebut telah direkonstruksi sepanjang 167,77 Km. Untuk mencapai temu gelang, KPHL Rinjani barat harus melakukan rekonstruksi tata batas sepanjang 182,8 km untuk seluruh wilayah KPHL Rinjani Barat yang direncanakan selesai sampai dengan tahun 2019.

Tidak dipungkiri, selama ini untuk kegiatan pelaksanaan tata batas KPH Rinjani Barat bergantung pada BPKH sebagai salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satu tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan tata batas. Sementara itu, dalam melakukan tata batas BPKH tergantung pada pendanaan yang dibebankan kepada APBN melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kendala lainnya yang mempengaruhi terhambatnya proses tata batas adalah masih terjadinya konflik penguasaan dan pengelolaan hutan, diantaranya Desa Akar-akar, Desa Rempek (sertifikat hutan-98 Ha oleh pejabat kabupaten), Desa Senjajang-Jangkok, dan Desa Senaru. Konflik di Desa Rempek, Desa Jangkok,

dan Desa Senaru sudah dapat diselesaikan oleh KPH dengan menindaklanjuti sistem pengelolaan berbasis kemitraan. Di Desa Rempek sendiri telah terbentuk koperasi hasil kerjasama masyarakat dengan pihak KPH. Saat ini, daerah berkonflik yang belum selesai adalah Desa Akar-akar, dimana masyarakat menolak kehadiran KPH.

Tata Hutan

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tata hutan, KPHL Rinjani Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan inventarisasi diantaranya pada tahun 2011 pada Hutan Produksi Tetap KH. Pandan Mas (RTK.2) dan KH. Gunung Rinjani (RTK.1) seluas ± 5.200 Ha, dan untuk tahun 2012 pada Hutan Produksi Terbatas KH. Gunung Rinjani (RTK.1) seluas ± 7.000 Ha. KPHL Rinjani Barat juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan inventarisasi sosial ekonomi dan budaya/ kelembagaan masyarakat diwilyah KPH antara lain:

1. Identifikasi yang dilakukan di 36 desa sekitar kawasan hutan dengan mewawancarai 50 responden di setiap desa oleh KPHL Rinjani Barat.
2. Korea Forest Research Institute (KFRI) bekerjasama dengan Prodi Kehutanan UNRAM, Universitas Arizona dan Universitas Arizona Utara tahun 2012-2013, melakukan survey dengan metoda FGD/PRA terhadap 21 lokasi/desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.
3. Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi tahun 2012 melakukan kajian kelembagaan sekitar KPHL Rinjani Barat dengan sasaran lokasi di 6 desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Namun demikian, dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan belum terlihat pelibatan yang intensif dari masyarakat sekitar selain sebagai tenaga pendamping dan objek dari kegiatan inventarisasi. Masyarakat belum dilibatkan mulai dari proses perencanaan inventarisasi sampai proses pada proses evaluasinya.

Pelaksanaan penataan areal dan tata batas petak, KPHL Rinjani Barat mengacu pada peta kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar dari peruntukan pengelolaan kawasan. Dari luas keseluruhan KPHL Rinjani Barat, pelaksanaan penataan blok atau petak baru dikawasan hutan produksi sudah selesai dilakukan. KPHL Rinjani Barat melaksanakan inventarisasi tersebut tahun 2011 pada Hutan Produksi Tetap KH. Pandan Mas (RTK.2) dan KH. Gunung Rinjani (RTK.1) seluas ± 5.200 Ha, dan untuk tahun 2012 pada Hutan Produksi Terbatas KH. Gunung Rinjani (RTK.1) seluas ± 7.000 Ha. Namun begitu, Secara keseluruhan proses inventarisasi dan tata hutan di wilayah KPHL Rinjani Barat belum selesai dilakukan, rencananya akan selesai dilakukan pada tahun 2015 ini.

Rencana Kelola

Rencana kelola sebagai syarat operasionalisasi KPH masih harus di lengkapi. faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil penilaian di kriteria rencana kelola ini salah satunya karena belum tersedianya dokumen rencana bisnis KPH yang diharapkan dapat menjamin kemandirian KPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola hutan. Sementara di dalam RPHJP yang telah disusun, terdapat rencana penyusunan dokumen rencana bisnis KPH yang akan diselesaikan pada tahun 2015 ini.

Di sisi lain, dokumen-dokumen yang telah disusun (RPHJ Panjang dan Pendek) ternyata belum disosialisasikan dan diekspose kepada para pihak yang membutuhkan. Dari 2 desa yang dikunjungi, yaitu Desa Pemenang Barat dan Desa Sesaot, sampai saat ini belum ada sosialisasi RPJHP kepada masyarakat. padahal Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dengan maksud untuk mempermudah proses sinkronisasi dan koordinasi pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah KPH baik antar KPH dengan lembaga pemerintah maupun antar KPH dengan masyarakat di tingkat tapak.

Kapasitas Organisasi

Ketersediaan SDM dalam menjalankan kelembagaan KPH masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah aparat yang dimiliki dalam mengelola wilayah-wilayah di KPH. Sampai saat ini, KPHL Rinjani Barat hanya memiliki 18 staf berstatus PNS dan 2 staf merupakan tenaga honorer. Sementara itu, untuk menunjang kinerja KPH, kantor KPH memerlukan 25 orang dan Resort memerlukan 64 orang SDM yang punya kapasitas dibidangnya. Selain itu, jumlah kebutuhan tenaga mandor sesuai dengan fungsi hutan dan penataan blok, dibutuhkan 270 orang tenaga mandor. Mandor ini biasanya di rekrut dari kalangan masyarakat setempat.

Kurangnya alokasi tenaga PNS untuk mendukung operasionalisasi KPH dikarenakan penerimaan tenaga PNS melalui Dinas Kehutanan dengan kuota yang terbatas. Pada tahun 2015, Dinas Kehutanan hanya menerima 1 orang tenaga PNS. Hal ini jelas sangat kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Di sisi lain, KPH sebagai satuan kerja belum memiliki infrastruktur pengelolaan serta sistem informasi yang memadai agar dapat. meningkatkan pelayanan dan operasionalisasi KPH.

Hubungan Pemerintahan

Saat ini landasan hukum operasionalisasi KPH Rinjani Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 13 tahun 2014. Dengan demikian posisi KPH dapat disejajarkan dengan SKPD-SKPD lain di lingkungan provinsi NTB. sebagai salah satu SKPD. Seharusnya dokumen-dokumen perencanaan KPH dapat disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah yang lainnya seperti RPJMD dan RTRW. Temuan penilaian ini menunjukan bahwa selama ini proses sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan KPH belum dilakukan. Temuan lain menunjukan sampai saat proses penilaian belum pernah ada ekspos yang dilakukan oleh KPH kepada Bappeda sebagai koordinator bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dana APBN 2014 yang dikelola oleh Dinas Kehutanan NTB untuk pembangunan KPH sebesar Rp 988 juta untuk penyiapan pemantapan kawasan hutan, dimana kegiatannya mencakup sosialisasi batas kawasan hutan daerah, monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, sosialisasi pembangunan KPH, penyusunan neraca SDH propinsi, dan identifikasi dan inventarisasi permasalahan tenurial kawasan hutan. Sedangkan untuk fasilitasi operasional KPH diperoleh dari Ditjen Bina Usaha Kehutanan sebesar Rp 197,6 juta dan alokasi dana dari APBD untuk rehabilitasi hutan dan pemantapan operasional KPH sebesar Rp 565,2 juta. Untuk mendukung pendanaan lainnya, KPHL Rinjani Barat bekerjasama dengan NGO lokal dan Nasional, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti Universitas Mataram, dan lain-lain.

Mekanisme Investasi

KPHL Rinjani Barat belum memiliki sistem yang menjamin keamananan dan keberlanjutan investasi dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya struktur atau SOP yang menjamin pelayanan investasi dapat dijalankan dengan baik dan terukur, termasuk mekanisme bagi hasil dari proses investasi tersebut. Hal ini juga dilihat dari matriks rencana pengelolaan yang sudah dituangkan dalam RPHJP, tidak memperlihatkan item kegiatan yang memfokuskan kegiatan penyusunan instrument pengembangan usaha seperti struktur, SOP maupun mekanisme bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Yang diatur langsung terfokus tindakan-tindakan pengelolaan di lapangan seperti Kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, Perdagangan Karbon dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di Hutan Produksi, Pemanfaatan Sumberrdaya hutan, Pengolahan dan pemasaran hasil hutan, Monitoring dan Pembinaan ijin usaha pemanfaatan HHK-HT, dan HHK-HA kemitraan.

Hak Akses Masyarakat

Hak akses masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPH. Jaminan tersebut dituangkan dalam bentuk pengembangan sistem kemitraan masyarakat,

pengembangan PHBM seperti HKm dan HTR. Khususnya pada wilayah yang sudah memperoleh IUPHHKM dan kawasan tertentu serta pengakuan hak masyarakat adat melalui keputusan bersama antara KKPH dengan perwakilan lembaga adat di kabupaten Lombok Utara. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan hutan yang akan ditempuh melalui berbagai tahapan, yaitu: (a) pembentukan kelompok tani hutan 200 KTH, (b) pembinaan kelompok tani hutan 10 kegiatan, (c) pengembangan tanaman produktif di bawah tegakan 9.000 ha, (d) bantuan peralatan TTG dan hasil kemasan olahan HHBK 36 paket, (e) pembinaan kelompok usaha perlebahan 9 unit, (f) koperasi kelompok tani hutan 36 koperasi, dan (g) fasilitasi perkreditan kemitraan kehutanan 60 kegiatan.

Berdasarkan hasil survey tahun 2011, luas kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat secara ilegal (non program) tercatat seluas ± 18.749,99 Ha, dan menurut tingkatan eskalasi konflik tenurial terdiri dari eskalasi rendah seluas ± 14.627,37 Ha, eskalasi sedang seluas ± 3.210,06 Ha, dan eskalasi tinggi seluas ± 912,56 Ha (termasuk kasus sertifikat hutan di Rempek seluas ± 86 Ha). Kasus-kasus konflik dan gangguan kehutanan yang terjadi atas dasar kekecewaan masyarakat kepada pemerintah sebelum KPH ada, sistem pengelolaan masih belum transparan dan tertutup khususnya pengalokasian/penunjukan kawasan untuk usaha kehutanan. Selain itu, pengusaha kehutanan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, kebanyakan masyarakat berperan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Implementasi Pengelolaan

Belum terdapat proses sinkronisasi antara dokumen perencanaan yang dimiliki KPH dengan pemegang izin di wilayah KPH termasuk masyarakat dan pengusaha yang berakibat pada kemungkinan terjadinya informasi yang tidak seimbang dari masing-masing aktor tersebut. Dalam konteks pengelolaan lainnya seperti fasilitasi pemasaran dan pembinaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum dilakukan secara maksimal oleh KPH, karena keterbatasan anggaran dan belum adanya rencana bisnis yang dimiliki KPH sebagai salah satu pedoman untuk pengembangan usaha dan pemasaran.

Dalam penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan lindung, melalui kegiatan reboisasi pengkayaan tahun 2012, KPHL Rinjani Barat secara proaktif telah melakukan beberapa upaya antara lain: (a) menyusun perencanaan secara partisipatif, (b) merancang seluruh kegiatan pengelolaan hutan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan saling menguntungkan, (c) memprioritaskan pengembangan tanaman MPTS yang unggul, mempunyai prosfek pasar, dan menunjang skala bisnis KPH, dan (d) menyepakati seluruh kawasan hutan lindung yang sudah dikelola masyarakat dirancang menjadi blok pemanfaatan.

Kegiatan konservasi sumber daya alam yang dilakukan pada KPHL Rinjani Barat tahun 2010-2013 antara lain identifikasi habitat satwa dilindungi, identifikasi obyek daya tarik wisata, dan pembuatan blok inti/blok khusus/blok perlindungan, yang dipersiapkan sebagai tempat perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian satwa/flora dilindungi. Kegiatan konvergensi dari Balai KSDA NTB antara lan; pembinaan model desa konservasi, pembentukan kader konservasi, pembinaan/ penilaian dan pertemuan kader konservasi dan kelompok pencinta alam. Sedangkan kegiatan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pembinaan model desa konservasi.

SIMPULAN

KPH Rinjani sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak, namun beberapa kriteria perlu diperkuat untuk menjamin operasionalisasi KPH di tingkat tapak, yaitu kemantapan kawasan, rencana kelola, dan mekanisme investasi. Kebutuhan SDM yang berkualitas dan memadai menjadi persoalan utama dalam mendorong operasionalisasi kelembagaan KPH, sehingga menghambat implementasi program-program yang telah direncanakan dalam RPHJP KPH. Jika pembangunan KPH termasuk

dalam prioritas utama dalam RPJMN, maka sudah semestinya kebutuhan SDM ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk segera diatasi. Demikian juga dalam konteks penataan sistem kelembagaan KPH yang selama ini dirasakan masih sangat lemah baik dari sisi dukungan regulasi, infrastruktur, dan pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). Metodologi penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Forest Watch Indonesia. (2014). Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dengan menggunakan kriteria dan indikator *FWI 1.0*. Bogor: Author.

Kartodihardjo, H., & Suwarno, E. (2014). Pengarusutamaan kesatuan pengelolaan hutan (kph) dalam kebijakan dan pelaksanaan perizinan kehutanan. Jakarta: Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat, 2013. Dokumen Rencana Pengolaan Hutan Jagka Panjang KPHL Rinjani Barat 2014 – 2023. Mataram-NTB.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat, 2011. Dokumen Laporan inventarisasi Sumberdaya Hutan Di Wilayah KPHL Rinjani Barat. Mataram-NTB

Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat, 2011. Dokumen Laporan Survei Sosial Ekonomi Di Wilayah KPHL Rinjani Barat. Mataram-NTB

Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat, 2012. Dokumen Laporan Penatan Blok Petak dan Risalah Hutan Produksi Di Wilayah KPHL Rinjani Barat. Mataram-NTB

[FWI] Forest Watch Indonesia. 2014. Panduan penilaian kinerja pembangunan KPH dengan Menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0. Bogor: Forest Watch Indonesia.

Suwarno, E. (2014). Analisis kelembagaan proses operasionalisasi KPH: Studi kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

Wiyono, A., Surma, E.H., Tadjudin, D., Permatasari, E., Helmi, F.W., Julmansyah, Erwinsyah, T. (2006). Kehutanan multipihak langkah menuju perubahan. Bogor: Center For International Forestry Research.